

Paradoks Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan di Taman Nasional Sebangau: Studi Kasus Kelurahan Kereng Bangkirai

Yonatan Ari Santoso¹, Arif², Gabriel Keintjem³, Felicitya Navida⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya, Indonesia.

*Email: yonatan.arisantoso@fisip.upr.ac.id¹, jrarif280@gmail.com²,
keintjemgabriel91219@gmail.com³, navidafelicitya20@gmail.com⁴

Alamat: Jl. Yos Sudarso Palangka Raya Kalimantan Tengah, 73111.

Korespondensi penulis: yonatan.arisantoso@fisip.upr.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the Paradox of Sustainable Tourism Development in Sebangau National Park (a case study in Kereng Bangkirai Regency). Using a qualitative approach and case study design, data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation. The results show an imbalance between the objectives of sustainable tourism development and their implementation in the field. Key findings point to several critical issues, including a lack of clarity regarding the Government Decree (KTT) from the Tourism Management Unit, which leads to weak institutional governance, ineffective communication and coordination between the government and local communities, limited supporting infrastructure, and underutilization of developed facilities. Furthermore, high kiosk rental costs and a lack of tourism promotion have reduced the effectiveness of local economic empowerment. This condition has resulted in decreased community participation in destination management. This study offers solutions by strengthening collaborative governance, improving coordination between stakeholders, and optimizing the roles of the community and government to achieve sustainable, participatory, and equitable tourism development.*

Keywords: *Sustainable Tourism, Development Paradox, Collaborative Governance, Community Empowerment, Kereng Bangkirai*

Abstrak. Studi ini bertujuan untuk menganalisis Paradoks Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan di Taman Nasional Sebangau (studi kasus di Kabupaten Kereng Bangkirai). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan ketidakseimbangan antara tujuan pembangunan pariwisata berkelanjutan dan implementasinya di lapangan. Temuan utama menunjukkan beberapa isu penting, termasuk kurangnya kejelasan mengenai Keputusan Pemerintah (KTT) dari Satuan Pengelola Pariwisata, yang menyebabkan lemahnya tata kelola kelembagaan, komunikasi dan koordinasi yang tidak efektif antara pemerintah dan masyarakat setempat, terbatasnya infrastruktur pendukung, dan kurangnya pemanfaatan fasilitas yang telah dikembangkan. Lebih lanjut, tingginya biaya sewa kios dan kurangnya promosi pariwisata telah mengurangi efektivitas pemberdayaan ekonomi lokal. Kondisi ini mengakibatkan penurunan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan destinasi. Studi ini menawarkan solusi dengan memperkuat tata kelola kolaboratif, meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan, dan mengoptimalkan peran masyarakat dan pemerintah untuk mencapai pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, partisipatif, dan adil.

Kata kunci: Pariwisata Berkelanjutan, Paradoks Pembangunan, Tata Kelola Kolaboratif, Pemberdayaan Masyarakat, Kereng Bangkirai

*Corresponding author, yonatan.arisantoso@fisip.upr.ac.id

LATAR BELAKANG

Pariwisata berkelanjutan merupakan salah satu strategi pembangunan yang mengutamakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, serta kesejahteraan sosial dan budaya masyarakat lokal. Konsep ini bertujuan untuk mengkaji kembali bahwa pemanfaatan sumber daya pariwisata tidak mengorbankan kebutuhan generasi mendatang (Alfarizi et al., 2025). Dalam konteks pembangunan nasional, pariwisata berkelanjutan menjadi bagian integral dari kebijakan pengembangan destinasi wisata yang berorientasi pada keberlanjutan dan pemberdayaan masyarakat (K & Rahmatullah, 2024).

Taman Nasional Sebangau di Provinsi Kalimantan Tengah merupakan kawasan konservasi strategis yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi serta potensi pariwisata alam yang besar. Kawasan ini dikenal sebagai habitat alami orangutan dan ekosistem rawa gambut yang memiliki daya tarik sendiri, sehingga pengelolaan pariwisatanya menuntut pendekatan yang berkelanjutan (Sebangau, 2024). Kelurahan Kereng Bangkirai sebagai destinasi wisata utama menuju Kawasan Taman Nasional Sebangau berbasis masyarakat dengan harapan mampu meningkatkan perekonomian lokal sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Namun, dalam praktiknya pengembangan pariwisata di Kelurahan Kereng Bangkirai menunjukkan adanya paradoks pembangunan pariwisata berkelanjutan, yaitu ketidakseimbangan antara tujuan pembangunan berkelanjutan dan realita di lapangan. Paradoks ini tercermin dari lemahnya tata Kelola kelembagaan, kurang efektifnya komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan, keterbatasan infrastruktur pendukung, serta pembangunan fasilitas wisata yang tidak dimanfaatkan secara optimal. Kondisi ini berdampak pada rendahnya efektivitas pemberdayaan Masyarakat dan menurunnya partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata (Muhammad & Moralina Aweda Naresworo, 2024).

Beberapa penelitian terdahulu mengemukakan bahwa keberhasilan Pembangunan pariwisata berkelanjutan bergantung pada efektivitas tata Kelola kolaboratif dan partisipasi aktif Masyarakat lokal (Ningsih et al., 2025). Partisipasi masyarakat sebaiknya dilakukan secara menyeluruh mulai dari tahap awal yaitu, perencanaan, masuk ke tahap pelaksanaan hingga ke tahap pemanfaatan dan

evaluasi, untuk menjamin keberlanjutan sosial dan lingkungan dalam pengembangan wisata berbasis masyarakat (Anggraini & Murlianti, 2025). Selain itu, lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan dan minimnya partisipasi masyarakat menjadi penghambat utama keberhasilan pengelolaan dan pembangunan pariwisata berkelanjutan (Pratiwi, 2025).

Penelitian ini untuk mengingatkan bahwa pentingnya Taman Nasional Sebangau sebagai kawasan konservasi nasional yang memiliki fungsi ekologis. Pengembangan pariwisata yang tidak di kelola secara optimal berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan, konflik kepentingan, serta ketimpangan ekonomi bagi masyarakat lokal (Wardan, c2025). Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai paradoks pembangunan pariwisata berkelanjutan di kawasan ini menjadi sangat penting sebagai dasar perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan yang lebih efektif, inklusif, dan berkeadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis paradoks pembangunan pariwisata berkelanjutan di Taman Nasional Sebangau dengan studi kasus di Kelurahan Kereng Bangkirai. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan tata kelola kelembagaan, pola komunikasi dan koordinasi pemangku kepentingan, tingkat partisipasi masyarakat, serta dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi lokal. Hasil penelitian di harapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis bagi pengembangan kajian pariwisata berkelanjutan serta kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dan pengelola destinasi dalam mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, partisipatif, dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam fenomena Paradoks Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan yang terjadi di Kawasan Taman Nasional Sebangau di Kelurahan Kereng. Pendekatan kualitatif dipilih karena dapat menjawab makna, persepsi, dan pengalaman masyarakat terhadap dinamika pembangunan pariwisata secara mendalam dalam konteks sosial yang nyata. Menurut Creswell, penelitian kualitatif merupakan

pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu permasalahan sosial (Herman Sjahrudin, 2024).

Penelitian ini menggunakan desain studi kasus, dengan fokus pada kondisi pembangunan pariwisata di Kawasan Taman Nasional Sebangau yang melibatkan masyarakat lokal. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan informan yang meliputi lurah kelurahan Kereng Bangkirai, ketua RT, pelaku usaha, pengurus kelompok sadar wisata yang lama, serta Masyarakat setempat. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur seperti jurnal ilmiah, buku, serta dokumen terkait yang relevan dengan topik penelitian (Sugiyono, 2013).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, data analisis menggunakan teknik analisis data kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk mengidentifikasi penyebab serta dampak sosial dari pembangunan pariwisata di wilayah penelitian (Miles et al., 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan Pariwisata di Kereng Bangkirai

Pengembangan bidang pariwisata sering kali dianggap sebagai alat penting untuk merangsang pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan komunitas lokal. Namun, dalam proses pengembangan tempat wisata, sering kali terdapat berbagai kendala, seperti kurangnya infrastruktur, koordinasi antara pihak-pihak terkait, serta distribusi manfaat ekonomi yang tidak merata. Penelitian tentang pengembangan pariwisata menunjukkan bahwa keberhasilan suatu destinasi tidak hanya bergantung pada potensi alamnya, tetapi juga pada manajemen yang baik, partisipasi masyarakat, dan dukungan dari lembaga yang sesuai (Wahyudin et al., 2024).

Dalam konteks setempat, wilayah Kereng Bangkirai di Kota Palangka Raya semakin dikenal sebagai salah satu tujuan pariwisata yang mengandalkan

kekayaan alam dan terhubung dengan area pelestarian Taman Nasional Sebangau. Pihak pemerintah daerah berusaha menarik minat wisatawan dengan membangun infrastruktur, mempromosikan lokasi, serta mengembangkan kegiatan wisata air di area pelabuhan Kereng Bangkirai. Inisiatif ini mendorong munculnya berbagai kegiatan ekonomi bagi masyarakat seperti layanan pariwisata, perdagangan, dan usaha kecil di sekitar lokasi wisata. Penelitian yang dilakukan sebelumnya mengindikasikan bahwa kemajuan pariwisata di area Kereng Bangkirai turut berkontribusi pada pergeseran sumber pendapatan masyarakat lokal dari sektor tradisional ke kegiatan ekonomi yang berfokus pada pariwisata. Ini menunjukkan bahwa pengembangan tempat wisata dapat menciptakan kesempatan ekonomi baru bagi penduduk setempat, meskipun dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala dalam pengelolaan dan tata kelola destinasi (Pebrianti & Silalahi, 2025).

Pengembangan Pariwisata di Kereng Bangkirai

Tata Kelola kelembagaan dalam pengelola wisata Kereng Bangkirai melibatkan beberapa aktor utama, yaitu pemerintah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), serta masyarakat sekitar termasuk pelaku UMKM. Pada awalnya pengelolaan kawasan wisata ini diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan sektor pariwisata lokal. Dalam konsep pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) memiliki peran penting sebagai lembaga lokal yang menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan potensi wisata serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pariwisata (Pina Azizah, Muhammad Irfan Hilmi, 2023).

Dalam struktur kelembagaan, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) memiliki masa jabatan satu periode selama dua tahun dan berperan dalam mengelola aktivitas wisata di tingkat masyarakat. Sementara itu, pemerintah berperan dalam penyusunan kebijakan, pengembangan infrastruktur, serta pengelolaan administrasi kawasan wisata. Mekanisme pengambilan keputusan biasanya

dilakukan melalui forum musyawarah, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan setiap tahun serta Rapat Reses untuk menampung aspirasi masyarakat. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan pariwisata sangat penting karena pengembangan destinasi wisata memerlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha agar pengelolaan destinasi dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan (Hasdiansa et al., 2024).

Permasalahan kelembagaan seperti ini, ditemukan dalam beberapa penelitian terdahulu. Kelembagaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sering menghadapi tantangan berupa lemahnya kapasitas organisasi, kurangnya perencanaan kelembagaan, serta belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan destinasi wisata (Listyorini et al., 2021). Selain itu, penelitian lain juga menjelaskan bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan Pokdarwis sangat diperlukan agar pengelolaan destinasi wisata dapat berjalan lebih efektif, terutama dalam aspek manajemen organisasi, pengelolaan keuangan, serta pengembangan promosi destinasi wisata (Risyanti et al., 2025).

Tata Kelola kelembagaan dalam pengelolaan wisata Kereng Bangkirai masih memerlukan penguatan terutama dalam aspek transparansi kebijakan, legalitas kelembagaan, serta peningkatan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat. Penguatan kelembagaan Pokdarwis serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menjadi faktor penting dalam menciptakan pengelolaan wisata yang lebih partisipatif dan berkelanjutan.

Pengembangan Komunikasi, Koordinasi, Tata Kelola Multi Level

Permasalahan utama dalam pengelolaan pariwisata di Kelurahan Kereng Bangkirai terletak pada lemahnya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah, dinas terkait, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) serta masyarakat lokal. Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya tata kelola multi-level dalam implementasi kebijakan pariwisata berkelanjutan.

Temuan menarik di lapangan mengenai, ketidakjelasan surat Keputusan (SK) kelompok pengelola wisata belum diterbitkan secara resmi oleh pemerintah, muncul fenomena SK hantu yang tidak pernah disosialisasikan kepada masyarakat. Ketidakpastian atas status legal kelembagaan menimbulkan kebingungan struktural, lemahnya legitimasi organisasi, serta berujung pada konflik antara masyarakat dan dinas terkait. Situasi tersebut mencerminkan lemahnya mekanisme komunikasi vertikal antara pemerintah kota, dinas pariwisata, dan masyarakat sebagai aktor pelaksana di tingkat lokal.

Dalam perspektif tata Kelola multi-level, ditekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh pembagian kewenangan yang jelas, efektivitas koordinasi lintas level pemerintahan, serta kapasitas institusional aktor di setiap level (Hooghe & Marks, 2003). Kelurahan Kereng Bangkirai, pola koordinasi yang terjadi masih bersifat formalistik dan tidak terstruktur, terbatas pada forum musrenbang tahunan dan rapat reses, sehingga belum mampu mengakomodasi dinamika persoalan yang berkembang secara cepat dalam pengelolaan destinasi wisata.

Minimnya intensitas komunikasi ini berdampak pada lemahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat cenderung hanya menjadi objek kebijakan, bukan subjek yang terlibat dalam pembangunan tersebut. Kelemahan institusi birokrasi daerah menyebabkan dominasi jaringan informal, patronase, dan elit lokal, termasuk di Indonesia, sehingga mekanisme partisipatif formal gagal berjalan secara optimal (Agustino, 2022). Selain itu, konflik internal yang terjadi dalam pengelolaan keuangan dan manajemen wisata menyebabkan pemerintah mengambil alih sepenuhnya pengelolaan destinasi wisata tersebut. Meskipun langkah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas operasional, namun justru menimbulkan paradoks masyarakat karena dianggap menghilangkan ruang partisipasi dan kontrol lokal. Kondisi ini memperlihatkan paradoks tata kelola, dimana upaya meningkatkan efisiensi justru melemahkan dimensi demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Paradoks tata kelola organisasi berbasis komunitas, yaitu ketegangan antara prinsip partisipasi demokratis dan prinsip efisiensi manajerial (Cornforth, 2004). Di

Kereng Bangkirai, ketidaksiapan kapasitas manajerial masyarakat terbukti melalui pendekatan sentralisasi oleh pemerintah, bukan melalui strategi penguatan kapasitas secara bertahap, seperti pada konsep good enough governance (Hidayat, 2016).

Infrastruktur Wisata dan Inefisiensi Pembangunan

Pembangunan infrastruktur wisata di kereng bangkirai belum sepenuhnya dirancang berdasarkan prinsip efisiensi, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta keberlanjutan ekonomi. Salah satu temuan utama adalah pembangunan fasilitas kuliner yang menelan anggaran yang sangat besar, namun tidak dimanfaatkan secara optimal, bahkan cenderung terbengkalai. Tingginya harga sewa ruko atau tempat berjualan, yakni Rp400.000/bulan, serta Lokasi bangunan yang kurang strategis menyebabkan rendahnya minat pelaku UMKM untuk memanfaatkan fasilitas tersebut. Akibatnya, fasilitas yang seharusnya menjadi pusat ekonomi masyarakat malah justru menjadi aset pasif tidak menghasilkan nilai atau dampak ekonomi yang nyata. Kondisi ini menunjukkan adanya perencanaan pembangunan yang masih kurang tepat, baik dari tahap analisis kebutuhan, daya beli masyarakat, maupun potensi pasar wisata.

Selain itu, minimnya infrastruktur dasar seperti akses jalan masuk dan papan petunjuk arah mengurangi daya tarik destinasi. Keterbatasan fasilitas pendukung ini berdampak langsung terhadap rendahnya jumlah pengunjung wisata, sehingga memperlemah potensi peluang ekonomi lokal. Keberlanjutan pariwisata tidak hanya ditentukan oleh daya tarik alam, tetapi juga oleh kualitas infrastruktur dan sistem pendukung yang memadai (Pratami et al., 2021).

Pembangunan infrastruktur yang tidak disertai dengan strategi promosi dan branding destinasi menyebabkan potensi ekonomi tidak berkembang secara optimal. Pelaku UMKM menyampaikan bahwa kontribusi pemerintah dalam hal promosi digital masih sangat terbatas, padahal strategi pemasaran berbasis digital merupakan elemen penting dalam pengembangan destinasi wisata modern (Reza Nurul Ichsan et al., 2024).

Inefisiensi Pembangunan infrastruktur di Kereng Bangkirai mencerminkan adanya kesenjangan antara perencanaan dan implementasi kebijakan pariwisata. Berlandaskan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, Pembangunan yang tidak berbasis kebutuhan justru memperbesar beban biaya operasional dan memperlemah keberlanjutan destinasi wisata.

Partisipasi Masyarakat dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Keterlibatan warga sekitar dalam manajemen Objek Wisata Air Hitam Dermaga Kereng Bangkirai termanifestasi melalui keterlibatan mereka dalam beragam kegiatan operasional wisata, misalnya sebagai staf tiket, pemandu tur, operator kapal, pelaku UMKM, serta pengelola area parkir. Staf penjualan tiket merupakan warga lokal yang bekerja bergantian berdasarkan skema upah yang diputuskan oleh Dinas Pariwisata Kota Palangka Raya, sementara para pemandu tur berasal dari kelompok warga setempat dan penghasilan mereka bergantung pada jumlah rombongan wisata yang mereka dampingi. Model keterlibatan semacam ini mengisyaratkan bahwa masyarakat masih memegang peranan dalam sisi teknis atau operasional penyediaan jasa wisata. Dalam kajian pengembangan pariwisata yang berpusat pada masyarakat, bentuk partisipasi seperti ini menandakan bahwa warga sudah ambil bagian dalam kegiatan ekonomi wisata, meskipun seringkali peran mereka sebatas pada pelaksanaan kegiatan wisata saja (Cole, 2006; Okazaki, 2008).

Dalam sudut pandang teori partisipasi, keterlibatan masyarakat yang hanya terbatas pada aspek operasional menunjukkan rendahnya partisipasi karena tidak melibatkan peranan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan (Arnstein, 2019). Hal ini juga tampak pada pengelolaan objek wisata yang secara resmi berada di bawah tanggung jawab Pokdarwis, tetapi ketika penelitian dilakukan, organisasi tersebut tidak aktif akibat adanya konflik dalam kepengurusan dan ketidakjelasan mengenai Surat Keputusan. Sebagai akibatnya, pengelolaan atraksi menjadi kurang terorganisir dan mencerminkan rendahnya kemampuan dari lembaga lokal. Keadaan seperti ini sangat menggambarkan sebuah ketidakstabilan lembaga, yang pada akhirnya menghalangi

efektivitas dari pariwisata yang berbasis komunitas (Nur Riswandy Marsuki et al., 2025)

Dari perspektif ekonomi setempat, kegiatan UMKM meliputi penjualan makanan, minuman, produk olahan dari ikan, barang-barang herbal seperti akar bajakah, serta kerajinan dari rotan. Walaupun menciptakan kesempatan ekonomi, manfaatnya tidak tersebar merata dan sangat dipengaruhi oleh jumlah pengunjung. Pendapatan yang cukup rendah pada hari biasa dan meningkat tajam saat hari libur menunjukkan bahwa ekonomi setempat masih tergantung pada pola musiman (Vancells Farraró, 2023). Distribusi manfaat yang terpusat pada kelompok tertentu mengindikasikan bahwa pemberdayaan ekonomi lokal belum terjadi secara menyeluruh (Agarwal et al., 2023).

Secara garis besar, partisipasi publik di daerah Kereng Bangkirai memperlihatkan sifat yang bertolak belakang, warga turut serta giat dalam kegiatan wisata, tetapi peran mereka masih lemah dalam menentukan arah maupun mengurus badan pengelola pariwisata. Situasi ini menandakan bahwa kemajuan ekonomi setempat belum tercapai optimal, sebab keuntungan finansial yang didapat warga masih sedikit dan pembagiannya belum merata. Jika ditinjau dari sudut pandang pariwisata yang lestari, partisipasi warga merupakan unsur krusial agar dampak ekonomi dari industri wisata dapat tersebar lebih luas kepada seluruh kelompok masyarakat setempat (Ashley & Roe, 2002).

Pengembangan Pariwisata di Kereng Bangkirai

Temuan dari penelitian mengindikasikan bahwa pertumbuhan sektor pariwisata di wilayah Kereng Bangkirai tidak hanya dipengaruhi oleh potensi sumber daya alam yang ada, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan tata kelola lembaga, kerja sama di antara berbagai pihak, serta sejauh mana masyarakat terlibat dalam kegiatan ekonomi pariwisata. Berbagai masalah yang teridentifikasi, seperti konflik antar lembaga, kurangnya koordinasi, serta ketergantungan ekonomi pada perubahan jumlah pengunjung, menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan memerlukan pendekatan yang lebih terorganisir antara pemerintah, komunitas lokal, dan pelaku industri. Hal ini

sejalan dengan pandangan bahwa keberhasilan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola, kolaborasi antara para pemangku kepentingan, serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata (Bramwell & Lane, 2011; Hall, 2011).

Dalam situasi ini, pengelolaan pariwisata di Kereng Bangkirai membutuhkan suatu model pengaturan yang menekankan pentingnya kerjasama antara berbagai pihak dan peningkatan kapasitas lembaga di tingkat lokal. Strategi ini sejalan dengan ide tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan tujuan wisata yang menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat lokal, sektor bisnis, dan organisasi komunitas dalam tahap perencanaan serta pengelolaan tempat wisata (Ansell & Gash, 2008).

Selain itu, temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa keberlangsungan sektor pariwisata sangat terkait dengan tingkat partisipasi masyarakat lokal dalam manajemen serta keuntungan ekonomi yang mereka peroleh dari kegiatan wisata. Dengan demikian, model pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan harus menegaskan prinsip pariwisata berbasis masyarakat, yaitu pendekatan yang menjadikan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolaan sumber daya wisata dan sebagai pihak yang langsung mendapatkan manfaat dari kegiatan pariwisata (Goodwin & Santilli, 2007).

Pengembangan sektor pariwisata di Kereng Bangkirai membutuhkan suatu model manajemen yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fasilitas dan peningkatan jumlah pengunjung, tetapi juga pada perkuatan kapasitas lembaga lokal, peningkatan koordinasi di antara para pelaku, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan pariwisata yang berkelanjutan yang menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan kelembagaan dalam pengelolaan destinasi wisata (UNWTO, 2018).

KESIMPULAN DAN SARAN

Pembangunan pariwisata di kawasan Taman Nasional Sebangau, Kelurahan Kereng Bangkirai, memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat lokal melalui peningkatan aktivitas usaha dan keterlibatan dalam kegiatan wisata. Namun, implementasinya belum sepenuhnya selaras dengan prinsip pariwisata berkelanjutan karena masih terdapat kendala dalam tata kelola kelembagaan, koordinasi antar pemangku kepentingan, serta potensi konflik pengelolaan kawasan.

Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan pariwisata berkelanjutan memerlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pengelola kawasan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji strategi pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan lokal dengan pendekatan metode campuran untuk memahami dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan secara lebih komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- Agarwal, S., Isha, T., Tilaganji, V. Irappa, Akaremsetty, S., & Shekhar, C. (2023). The Impact of Tourism on Local Communities: A Literature Review of Socio-Economic Factors. *Journal of Harbin Engineering University*, 44(8), 1851–1859.
- Agustino, L., Hikmawan, M. D., & Silas, J. (2022). *Village Chiefs and Clientelism : A Reflection After 25 Years of Reform in Indonesia*.
- Alfarizi, M., Arifian, R., & Permana, A. (2025). *Jalin ristek*. 2(3).
- Anggraini, I. D., & Murlianti, S. (2025). *BENTUK-BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT MANGROVE DI KAMPUNG TELUK SEMANTING KECAMATAN PULAU DERAWAN KABUPATEN*. 13(3), 220–234.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Arnstein, S. (2019). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Planning Association*, 85, 24–34. <https://doi.org/10.1080/01944363.2018.1559388>
- Ashley, C., & Roe, D. (2002). Making tourism work for the poor: Strategies and challenges in southern Africa. *Development Southern Africa*, 19(1), 61–82.

<https://doi.org/10.1080/03768350220123855>

- Bramwell, B., & Lane, B. (2011). Critical research on the governance of tourism and sustainability Introduction. *Journal of Sustainable Tourism*, 19, 411–421. <https://doi.org/10.1080/09669582.2011.580586>
- Cole, S. (2006). Information and Empowerment: The Keys to Achieving Sustainable Tourism. *Journal of Sustainable Tourism*, 14(6), 629–644. <https://doi.org/10.2167/jost607.0>
- Cornforth, C. (2004). *THE GOVERNANCE OF COOPERATIVES AND MUTUAL ASSOCIATIONS: A PARADOX* by. 11–32. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8292.2004.00241.x>
- Goodwin, H., & Santilli, R. (2007). *Community-Based Tourism: a success? Community-Based Tourism: a success? Community-Based Tourism: a success?* 1–37. <http://www.andamandiscoveries.com/press/press-harold-goodwin.pdf>
- Hall, C. M. (2011). A typology of governance and its implications for tourism policy analysis. *Journal of Sustainable Tourism*, 19(4–5), 437–457. <https://doi.org/10.1080/09669582.2011.570346>
- Hasdiansa, I. W., Hidayat, A., Irfan, A. M., & Rakib, M. (2024). *Pelatihan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Melalui Kegiatan Tata Kelola Destinasi Pariwisata di Kabupaten Pinrang*. 1(2), 128–135.
- Hidayat, S. (2016). *MENIMBANG ULANG KONSEP GOOD GOVERNANCE* : 151–166.
- Hooghe, L., & Marks, G. (2003). *Unraveling the Central State, but How? Types of Multi-level Governance*. 97(2), 233–243.
- K, N. W. A., & Rahmatullah, A. (2024). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Mengurangi Kemiskinan Ekstrem Melalui Pariwisata Berkelanjutan (Studi Kasus Tanjung Kasuari Kota Sorong)*. 04(01), 99–108.
- Listyorini, H., Aryaningtyas, A. T., Wuntu, G., & Aprilliyani, R. (2021). *Merintis desa wisata , menguatkan kerjasama badan usaha milik desa dan kelompok sadar wisata*. 6717, 67–74.
- Muhammad, M., & Moralina Aweda Naresworo. (2024). *MEMBANGUN KEBERLANJUTAN EKOTOURISME MELALUI*. 8(3), 1–10.
- Ningsih, Fardina, A. F. Y. (2025). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Marina Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai *Fardina Ningsih 1 , Ahmad Fitra Yuza 2 1. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 2, 1–7.
- Nur Riswandy Marsuki, Darman Manda, Najamuddin, Syamsu. A. Kamaruddin, & Asrifan, A. (2025). Constructing Sustainable Community-Based Tourism: Institutional Challenges and Local Empowerment in Gowa Regency, Indonesia. *Journal of Humanities and Social Sciences Studies*, 7(4), 65–81. <https://doi.org/10.32996/jhsss.2025.7.4.7>
- Okazaki, E. (2008). A Community-Based Tourism Model: Its Conception and Use. *Journal of Sustainable Tourism*, 16, 511–529. <https://doi.org/10.1080/09669580802159594>

- Pebrianti, A., & Silalahi, J. N. (2025). Perubahan Mata Pencarian Masyarakat Pasca Kereng Bangkirai Menjadi Kawasan Pariwisata. *Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, 8(1), 2599–2473. <https://doi.org/10.31538/almada.v8i1.6036>
- Pina Azizah, Muhammad Irfan Hilmi, L. F. (2023). *DIKLUS: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*. 2(September), 156–169.
- Pratami, M., Gunari, B. F., & Rilansari, V. (2021). *Strategi Pengoptimalan Infrastruktur Pendukung Pariwisata Berkelanjutan*. 9(2).
- Pratiwi, Y. (2025). *Sinergi untuk Pesisir : Analisis Tata Kelola Kolaboratif dan CBT di Lima Desa Wisata Belitung*. 8, 215–226. <https://doi.org/10.32528/sw.v8i2.4602>
- Reza Nurul Ichsan, Laratmase, P., Novedliani, R., Utami, E. Y., & Tono Mahmudin. (2024). *DIGITALISASI DESTINASI SEBAGAI STRATEGI PENGEMBANGAN PROMOSI PARIWISATA DI INDONESIA*. 08(02), 1–13.
- Risyanti, Y. D., Supriyanto, S., & Guritno, B. (2025). *Penguatan SDM Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam Mewujudkan Pariwisata di Desa Rembul Bojong Tegal*. 2(12), 5687–5694.
- Vancells Farraró, A. (2023). *Tourism Issues: Seasonality and economic structure*.
- Wahyudin, C., Firliandoko, R., Amalia, N., Zulfa, A. A., Studi, P., Publik, A., Djuanda, U., Tol, J., No, C., Barat, J., Cecep, K., & Email, W. (2024). *MODEL TATAKELOLA PARIWISATA BERBASIS KOLABORATIF DALAM COLLABORATIVE BASED TOURISM GOVERNANCE MODEL IN SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga masih kurangnya ketertarikan wisatawan untuk mengunjungi destinasi . 10*, 147–164.
- Wardan. (2025). *Persepsi Masyarakat Lokal Terhadap Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Dan Implikasinya Bagi Perekonomian Daerah*. 4, 112–118.

Buku Teks

- Herman Sjahrudin, D. (2024). Metodologi Penelitian Ilmiah. In *Yayasan Kita Mandiri*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis*. sage.
- Prof. Dr. Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*.
- UNWTO. (2018). *Tourism and the Sustainable Development Goals ? Journey to 2030*. World Tourism Organization.

Artikel Laporan Instansi/Lembaga/Organisasi/Perusahaan

- Sebangau, T. N. (2024). *Sebangau's Biodiversity Fest 2024 Poin-poin Penting Keynote Speech & Arah Wamen LHK dalam Puncak Kegiatan Sebangau's Biodiversity Fest 2024*.